

SKRIPSI

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

BOBI DAMA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**BOBI DAMA
A31116001**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh

BOBI DAMA
A31116001

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

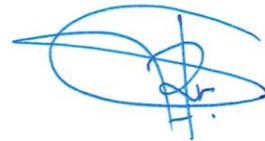
Makassar, 11 Januari 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA
Nip: 19650731 199103 2 002

Pembimbing 2



Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si, CA
Nip: 19650320 199203 2 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP 
NIP. 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

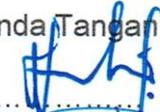
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh

BOBI DAMA
A31116001

Telah dipertahankan dalam siding ujian Skripsi
pada tanggal **25 Februari 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1... 
2	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak, M.Si, CA	Sekretaris	2... 
3	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., M.si., Ak., CA	Anggota	3... 
4	Drs. Muhammad Achyar Ibrahim, Ak., M. Si, CA	Anggota	4... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP 
NIP. 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Bobi Dama

NIM : A31116001

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian skripsi yang berjudul

**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Teknologi Informasi
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Toraja Utara**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Bobi Dama

PRAKATA

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada Ibu Prof. Dr. Hj Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk member arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak/Ibu Instansi BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian pada instansi Bapak/Ibu. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada seluruh staf bagian akuntansi dan keuangan yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Aris Dama dan Ibu Herlina Pagayang, serta ketiga saudara peneliti atas kasih sayang, motivasi dan doanya selama ini. Tak lupa peneliti ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., MM., Ak., CPMA. selaku Penasihat Akademik dari peneliti dan kepada seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis, keluarga besar PMKO, dan sahabat yang telah memberi nasihat, motivasi, dan arahan selama perkuliahan.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan oleh peneliti demi penyempurnaan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

Makassar, 25 Februari 2021

Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara

The Effect Of Government Internal Control Sistem and Information Technology on The Quality Of Government Financial Report in The North Toraja Regency

Bobi Dama
Haliah
Grace T. Pontoh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat dan aparat pelaksana fungsi akuntansi dan keuangan pada BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan total 48 responden. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan penggunaan teknologi informasi dalam suatu instansi pemerintah maka akan berdampak baik terhadap nilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kata Kunci: sistem pengendalian intern pemerintah, teknologi informasi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

This study aims to analyze the effect of government internal control system and information technology on the quality of government financial report. The data used in this study are primary data using a questionnaires in data collection. The population in this study were apparatus and government officials at BPKAD and Inspectorate in the North Toraja Regency. Sampling was done using purposive sampling with 48 respondents totally. The method used is a multiple regression analysis. Based on the results of data analysis, showed that government internal control system and information technology has a significant and positive effect on the quality of government financial report. This means, the better the implementation of the government internal control system and the use of information technology in a government agency will have a good impact on the quality of the financial statements result.

Keyword: *government internal control system, information technology, the quality of government financial report.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	12
2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	12
2.1.2.2 Komponen-Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	14
2.1.3 Teknologi Informasi	17
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Pemikiran	26
2.4 Hipotesis Penelitian.....	28
2.4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	28
2.4.2 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Rancangan Penelitian	32
3.2 Tempat dan Waktu	32
3.3 Populasi dan Sampel	33
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	34
3.6.1 Variabel Penelitian.....	34
3.6.2 Definisi Operasional.....	35
3.6.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	

Daerah (LKPD)	35
3.6.2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	35
3.6.2.3 Teknologi Informasi.....	36
3.7 Instrumen Penelitian	37
3.7.1 Skala Pengukuran	37
3.7.2 Uji Kualitas Data.....	38
3.7.2.1 Uji Validitas.....	38
3.7.2.2 Uji Realibilitas	39
3.8 Teknik Analisis Data.....	40
3.8.1 Uji Asumsi Klasik	40
3.8.1.1 Uji Normalitas	40
3.8.1.2 Uji Multikolinearitas	42
3.8.1.3 Uji Heteroskedastistas	42
3.8.2 Uji Hipotesis.....	42
3.8.2.1 Analisis Regresi Berganda.....	42
3.8.2.2 Koefisien Determinasi	43
3.8.2.3 Uji Parsial (t).....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Deskripsi Penelitian.....	44
4.2 Analisis Deskriptif.....	45
4.3 Instrumen Penelitian	46
4.3.1 Uji Kualitas Data	46
4.3.1.1 Uji Validitas.....	46
4.3.1.2 Uji Reliabilitas	47
4.3.2 Teknik Analisis Data	48
4.3.2.1 Uji Asumsi Klasik	48
4.3.2.1.1 Uji Normalitas.....	48
4.3.2.1.2 Uji Multikolinearitas	49
4.3.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	50
4.3.2.2 Pengujian Hipotesis.....	50
4.3.2.2.1 Analisis Regresi Berganda.....	50
4.3.2.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	51
4.3.2.2.3 Uji Statistik Parsial (t).....	52
4.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	53
4.4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	53
4.4.2 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	55
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
5.3 Keterbatasan	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Daftar Pejabat dan Aparat Pelaksana Fungsi Akuntansi dan Keuangan	33
4.1	Karakteristik Responden	45
4.2	<i>Descriptive Statistics</i>	45
4.3	Hasil Uji Multikolinearitas	49
4.4	Hasil Uji Parsial (Uji t)	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Grafik Opini LKPD Tahun 2018	4
1.2 Perkembangan Opini LKPD 2014-2018	5
2.1 Komponen Sistem Pengendalian Intern oleh COSO	15
2.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
2.4 Kerangka Konseptual.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	62
2	Peta Teori.....	64
3	Kuesioner Penelitian Skripsi	69
4	Hasil Olah Data Menggunakan SPSS	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan untuk menyediakan/memproduksi barang-barang publik. Karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta, organisasi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, perbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat tujuan untuk memaksimalkan laba (*profit motive*), sedangkan pada sektor publik adalah pemberian pelayanan dan penyediaan publik. Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas sektor swasta.

Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan dengan adanya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas organisasi-organisasi publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu bentuk kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah selama tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan harus bermanfaat bagi para pemakai dan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk mengatur pembuatan laporan keuangan, diantaranya adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan PP No. 71 tahun 2010, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah hingga saat ini.

Tujuan utama laporan keuangan pemerintah adalah memberikan informasi mengenai laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan kepada para pengguna laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 71 Tahun 2010.

1. Relevan.

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

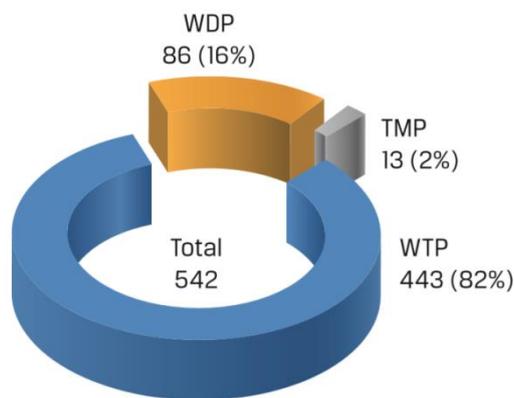
4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu penilaian mengenai baik buruknya laporan atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat dilihat dari opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga yang memeriksa dan menilai laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ketika BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Terdapat empat opini yang diberikan oleh BPK diantaranya: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Dalam hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 443 (82%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 86 (16%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 13 (2%) LKPD seperti terlihat dalam Gambar 1.1.

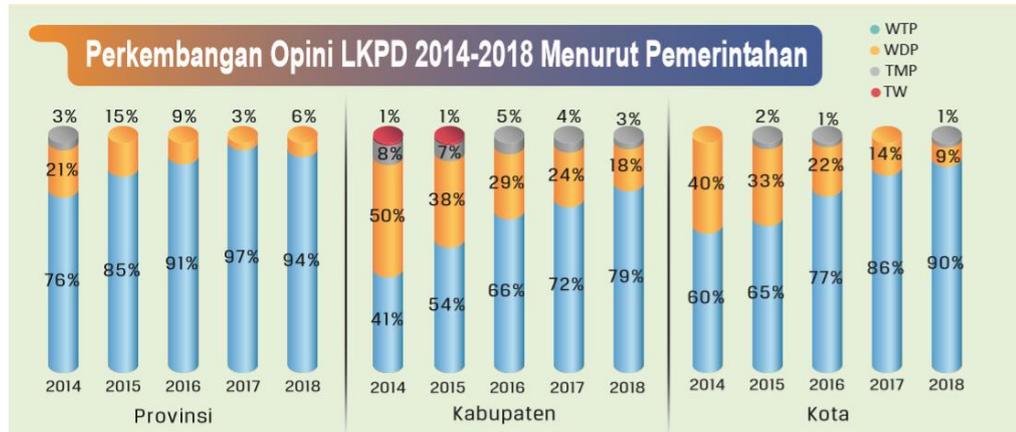


(sumber: BPK-RI melalui publikasi www.bpk.go.id)

Gambar 1.1 Grafik Opini LKPD Tahun 2018

Hasil evaluasi BPK mengungkapkan sebanyak 9.116 temuan yang memuat 14.965 permasalahan, meliputi 7.236 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.636 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 9,68 triliun, serta 93 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp. 676,81 triliun (IHPS 2019). Namun dalam lima tahun terakhir (2014-2018), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD memperoleh opini WTP naik sebanyak 35 poin persen, yaitu dari 47% pada LKPD tahun 2014 menjadi 82% pada LKPD tahun 2018. Sementara

itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP dan TMP mengalami penurunan masing-masing sebesar 30 poin persen (dari 46% menjadi 16%) dan empat poin persen (dari 6% menjadi 2%) (IHPS 2019), seperti terlihat dalam Gambar 1.2.



(Sumber: BPK-RI melalui publikasi www.bpk.go.id)

Gambar 1.2 Perkembangan Opini LKPD 2014-2018

Hasil pemeriksaan BPK terhadap Kabupaten Toraja Utara selama 5 tahun terakhir adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun begitu, hasil pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengungkapkan beberapa temuan sebagai berikut. (LHP Toraja Utara, 2018)

1. Pengelolaan asset tetap pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum seluruhnya memadai,
2. Kesalahan penganggaran belanja modal,
3. Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa,
4. Pengelolaan belanja dana BOS pada Dinas Pendidikan Pemda Toraja Utara belum tertib.

Permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara umum terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas, serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian. Selain itu, aplikasi pencatatan dan pelaporan yang digunakan pemda belum dimutakhirkan dan memiliki kelemahan. Permasalahan kelemahan SPI juga terjadi karena Pemda belum menetapkan dan menyempurnakan kebijakan akuntansi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam melakukan penyusunan dan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penatausahaan terkait dengan pendapatan pajak dan retribusi (IHPS II, 2019). Masih terdapat beberapa masalah maka perlu adanya suatu perbaikan terhadap permasalahan yang masih terjadi, agar meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, salah satunya adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah. Sistem pengendalian intern yang baik akan menciptakan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terhindar dari penyimpangan. Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Kemajuan teknologi dengan berbagai kecanggihannya tentu menuntut semua instansi untuk memanfaatkan teknologi (Widiatmoko, 2020). Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat suatu teknologi informasi seperti, kecepatan pemrosesan transaksi dan penyajian laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar dan kemampuan *multiprocessing*, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah, terlebih jika informasi yang ada tidak atau belum

mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal (Nurillah, 2014).

Aprilia *et al.* (2019) dalam penelitiannya tentang pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik menyimpulkan bahwa secara parsial pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Budiawan dan Purnomo (2014) dimana sistem pengendalian intern juga tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota bogor. Namun, dalam penelitian Kemhay *et al.* (2019) tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan hasil dimana sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Muda *et al.* (2017) dalam penelitiannya tentang pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi yang dimoderasi dengan sistem akuntansi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, dalam penelitian Nurillah (2014) pemanfaatan teknologi informasi memberikan hasil yang positif terhadap kualitas laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara?
2. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Untuk untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut.

1. Kegunaan teoretis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk para pembaca yang akan mempelajari dan memahami serta menjadikan penelitian ini sebagai literatur lebih

mendalam mengenai disiplin ekonomi dan bisnis terutama dalam cakupan ilmu akuntansi sektor publik yang akan memberikan pandangan mengenai SPIP, teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan daerah khususnya di Kabupaten Toraja Utara.

2. Kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan penelitian ini merupakan masukan untuk dijadikan bahan strategi dalam rangka menciptakan dan mempertahankan kinerja BPKAD dalam mewujudkan *good governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) dengan uraian sebagai berikut.

Bab I mengenai pendahuluan. Bab ini berisi tentang tentang latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sebelumnya telah ditetapkan, selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka peneltian, serta hipotesis.

Bab III mengenai metode penelitian. Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data,

variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, serta analisis data.

Bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang deskripsi dan objek yang diteliti, analisis, serta pembahasan hasil penelitian data.

Bab V mengenai penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi merupakan teori yang menjelaskan masalah yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principle*) dan manajemen (agen). Pada teori ini agen selaku pihak yang diberikan kewenangan untuk menjalankan operasional perusahaanlah yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan *principle* (pemilik perusahaan). Pelimpahan ini menimbulkan pemisahan antara klaim residu dengan otoritas pengambilan keputusan. Pengendalian atas masalah keagenan di dalam proses pengambilan keputusan adalah penting bilamana pemerintah daerah pada saat melakukan dan melaksanakan suatu keputusan penting tersebut bukan merupakan pemegang klaim residual yang utama dan selanjutnya tidak menjadi bagian lain yang utama atas efek kesejahteraan dari keputusan mereka.

Berkaitan dengan sektor publik atau sektor pemerintahan, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai *principle* dan pemerintah sebagai agen (penerima wewenang).

“Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam sektor publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan pemerintah baik pusat maupun daerah terdapat hubungan keagenan antara masyarakat sebagai *principle* dan pemerintah sebagai agen”.

Teori keagenan melihat bahwa pemerintah sebagai agen bagi masyarakat akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya kepada masyarakat, dalam hal ini menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat dan sesuai dengan standar yang berlaku bagi para pengguna informasi keuangan.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengertian pengendalian intern yang dikeluarkan oleh INTOSAI (*International Organization of Supreme Audit Institution*, 2004) dalam bukunya berjudul *Guidelines for Internal Control Standards for the Publik Sektor* menyatakan bahwa

“Internal control is an integral process that is effected by an entity’s management and personnel and is designed to address risks and to provide reasonable assurance that in pursuit of the entity’s mission, the following general objectives are being achieved :

- a. executing orderly, ethical, economical, efficient and effective operations;*
- b. fulfilling accountability obligations;*
- c. complying with applicable laws and regulations;*
- d. safeguarding resource against loss, misuse and damage.*

Pengertian di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organization’s of the Treadway Commission (COSO)* yang mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut.

“Internal control are process, implemented by management, that are designed to provide reasonable assurance for :

- a. reliable financial and operational information;*
- b. compliance with policies and procedures plans, laws, rules, and regulations;*
- c. safeguarding of assets*

- d. *operational efficiency*
- e. *achievement of an established mission, objectives, and goals for enterprise operations and programs;*
- f. *integrity and ethical values.*

Definisi pengendalian internal yang dirumuskan oleh *Committee of Sponsoring Organization's of the Treadway Commission (COSO)*, diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

Selain itu, dalam Pemandagri No.4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pasal 1 ayat 16 dijelaskan bahwa

“Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan penyajian laporan keuangan”.

Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tujuan pengendalian intern sebagai berikut.

1. Kegiatan yang efektif dan efisien.

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif apabila rencana dan hasil dari setiap program pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pemerintah dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan produksi maupun pelayanan yang berkualitas dengan bahan baku atau sumber daya yang sesuai dengan standar.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus handal atau dapat dipercaya dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan.

3. Pengamanan aset.

Pengamanan aset merupakan isu penting yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kelalaian dalam pengamanan aset yang berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

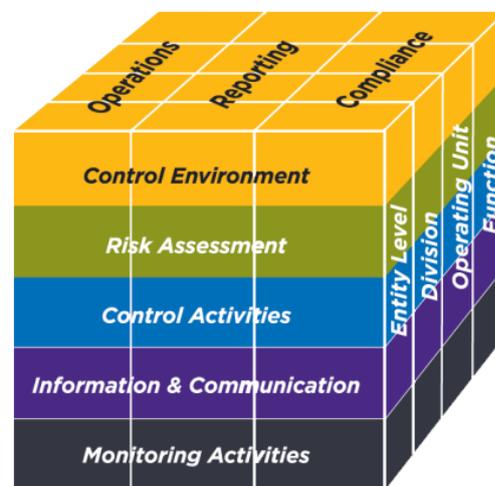
Setiap kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah harus taat terhadap kebijakan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran atas kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian.

2.1.2.2 Komponen-Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan uraian tujuan dari SPIP di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai komponen yang terkandung dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Tujuan komponen intern dapat dicapai jika manajemen menerapkan komponen-komponen pengendalian intern dari setiap aktivitas operasi. Komponen-komponen ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang diadopsi dari *Internal Control by Committee of Sponsoring Organization's of the Treadway Commission* (COSO) menyatakan bahwa unsur-unsur pembentuk SPIP antara lain.

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
3. Aktifitas Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Kelima komponen pengendalian internal dalam COSO tersebut digambarkan oleh *American Institute Of CPA's* (2019).



Sumber: *American Institute Of CPA's* (2019)

Gambar 2.1 Komponen Sistem Pengendalian Intern oleh COSO

1. Lingkungan Pengendalian

Dasar dari semua komponen sistem pengendalian internal yang dikemukakan oleh COSO ialah lingkungan pengendalian. COSO menekankan bahwa komponen lingkungan pengendalian memiliki pengaruh besar dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dan dalam penilain risiko. Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan oleh direksi, manajemen, dan lainnya mengenai pentingnya lingkungan pengendalian dalam sebuah organisasi. Apabila lingkungan pengendalian baik, maka dapat memberi pengaruh yang baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, apabila

lingkungan pengendalian buruk, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuan, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Gambar 2.1 menunjukkan tingkat berikutnya di atas lingkungan pengendalian adalah penilaian risiko. Kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya dapat berisiko karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penilaian risiko dalam sebuah organisasi harus memiliki proses untuk mengevaluasi potensi adanya risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

3. Aktifitas Pengendalian

Aktifitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Aktifitas pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Aktivitas pengendalian yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah dan tentunya meningkatkan kemampuan manajemen dalam pengambilan keputusan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam bentuk sarana tertentu dan tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Informasi dan komunikasi yang baik akan berdampak pada kemampuan manajemen untuk

membuat keputusan yang semestinya dalam mengendalikan mengendalikan aktivitas dan menyiapkan laporan keuangan yang handal.

5. Pemantauan

Apabila semua komponen dalam sistem pengendalian internal pemerintah berjalan dengan baik, diperlukan pemantauan (*monitoring*) untuk setiap aspek dari semua komponen SPIP. Pemantauan dapat dilakukan pada saat kegiatan berjalan (*on going*), evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya.

2.1.3 Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan suatu alat atau dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang baik dan berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Teknologi informasi menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Penggunaan teknologi informasi menurut Wilkinson *et al.*, (2000) dalam Siregar (2017) memberikan manfaat antara lain.

1. Pemrosesan transaksi dan data lebih cepat,
2. Keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih baik,
3. *Cost* pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
4. Penyiapan laporan dan informasi lebih tepat waktu,
5. Tempat penyimpanan data lebih tinggi,
6. Pilihan pemasukan data dan penyediaan *output* lebih luas,
7. Produktivitas karyawan dan manajer lebih tinggi.

Kemajuan teknologi informasi yang pesat membuka peluang bagi instansi pemerintah untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya dan memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi. Manajemen/agen dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah wajib untuk memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah, dan juga menyampaikan informasi keuangan daerah kepada pengguna yang berkepentingan. Pemerintah pun perlu untuk mengoptimalkan penggunaan kemajuan teknologi informasi ini guna membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara efektif dan efisien.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan (Haliah, 2012). Kriteria dalam menilai kualitas laporan keuangan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan transaksi keuangan dan juga merupakan catatan informasi suatu entitas/organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari entitas tersebut. Di Indonesia laporan keuangan inti yang harus dibuat oleh

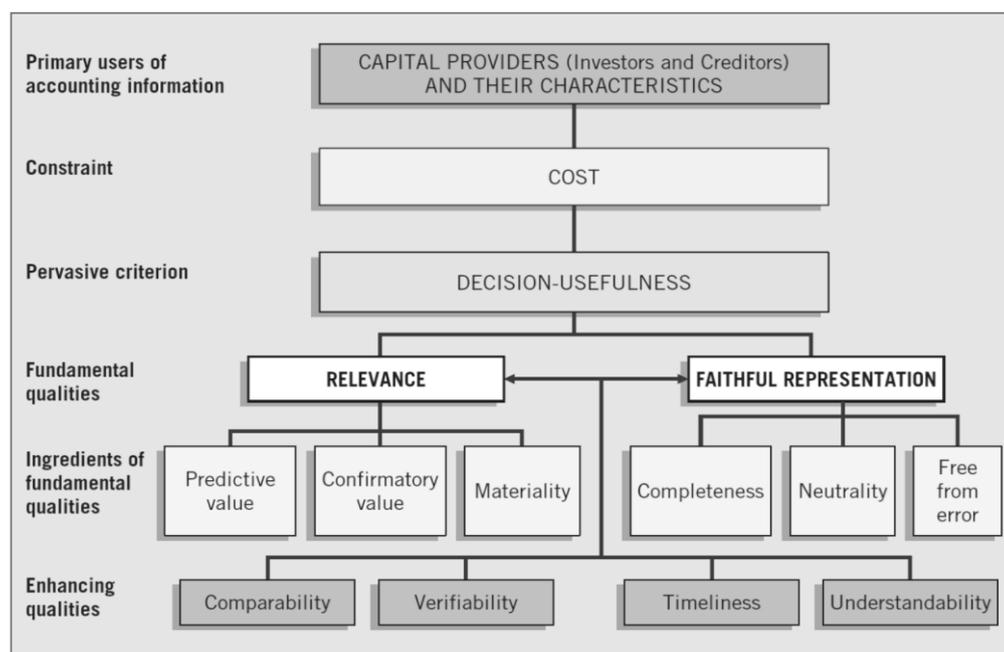
Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
3. Neraca,
4. Laporan Operasional,
5. Laporan Arus Kas,
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu instansi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan guna untuk pengambilan keputusan dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 digunakan sebagai.

- a. Akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada suatu instansi pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
- b. Manajemen, membantu para pengguna informasi keuangan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu instansi pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Tujuan laporan keuangan penting bagi pemerintahan sehingga pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangannya.

Kualitas laporan keuangan sebagai produk pemerintah tergantung kepada sejauh mana informasi laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan, agar pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus memenuhi prinsip karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna laporan keuangan. Terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu: dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Gambaran kerangka karakteristik laporan keuangan yang dikemukakan *Financial Accounting Standards Board (FASB)* dalam *Statements of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 8* tahun 2010.



Sumber : SFAC No.8 Tahun 2010

Gambar 2.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan untuk instansi pemerintah dinyatakan dalam *Governmental Accounting Standards Board*

(GASB, 1999) dalam *Concepts Statement* No.1 tentang tujuan laporan keuangan sebagai berikut.

- a. *Understandable. Governmental financial reporting should be expressed as simply as possible so that financial reports can be understood by those who may not have detailed knowledge of accounting principles.*
- b. *Reliable. The information presented in financial reports should be verifiable, free from bias, and should faithfully represent what it purports to represent.*
- c. *Relevant. Relevancy implies that there is a close logical connection between the information provided in financial reporting and its purpose.*
- d. *Timely. If financial reports are to be useful, they must be issued soon enough after the reported events to affect decisions.*
- e. *Consistent. Presumably, once an accounting principle or reporting method is adopted, it will be used for all similar transaction and events. Consistency should extend to all areas of financial reporting, including valuation methods, basis of accounting, and determination of the financial reporting entity.*
- f. *Comparable. Financial reporting should facilitate comparisons between governments, such as comparing costs of specific functions or components of revenue.*

Karakteristik tersebut diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa karakteristik laporan keuangan pemerintah antara lain.

1. Relevan. Informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi dari masa lalu. Kriteria informasi yang relevan:
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu. Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap. Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut.
 - a. Penyajian jujur. Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.
 - b. Dapat diverifikasi. Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.
 - c. Netralitas. Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
 3. Dapat dibandingkan. Informasi dalam laporan keuangan berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya.
 4. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk atau istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dan dasar dalam merumuskan hipotesis. Penelitian terdahulu merupakan kajian empiris yang menguraikan hubungan antar variabel penelitian berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya.

Mudaet *al.* (2017) meneliti tentang pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan menyebarkan 108 kuesioner di beberapa SKPD kabupaten Labuhanbatu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *measurement test* dan *structural model test*. Penelitian ini memberikan hasil bahwa penggunaan teknologi informasi yang dimoderasi dengan sistem akuntansi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan T-statistik 0,6013 ($>1,98$).

Budiawan dan Purnomo (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana variabel independen yaitu sistem pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota bogor. Penelitiannya menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah kota bogor. Hasil analisis koefisien determinasi SPI terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 4% dengan $r_s = -0,200$, maka dapat disimpulkan bahwa SPI tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Nurillah (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan survey kuesioner yang

diberikan kepada 100 pegawai SKPD Kota Depok. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel independen atau variabel bebas diantaranya kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif (diterima) terhadap kualitas laporan keuangan. Diperoleh nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,029. Hal ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian intern memiliki nilai koefisien 0,030. Hal ini memberikan keyakinan mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan melalui pengendalian internal.

Kemhay *et al.* (2019) meneliti sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil dimana sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebagaimana dalam penelitian ini peranan dari sistem pengendalian internal terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah sangatlah tinggi yang terlihat dari laporan keuangan dan mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas. Sehingga dengan tanggung jawab dan nilai kedisiplinan dan pengawasan yang tinggi akan dapat mempengaruhi hasil dari laporan keuangan. Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan jauh dari tindakan *fraud*. Kompetensi sumberdaya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah juga berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

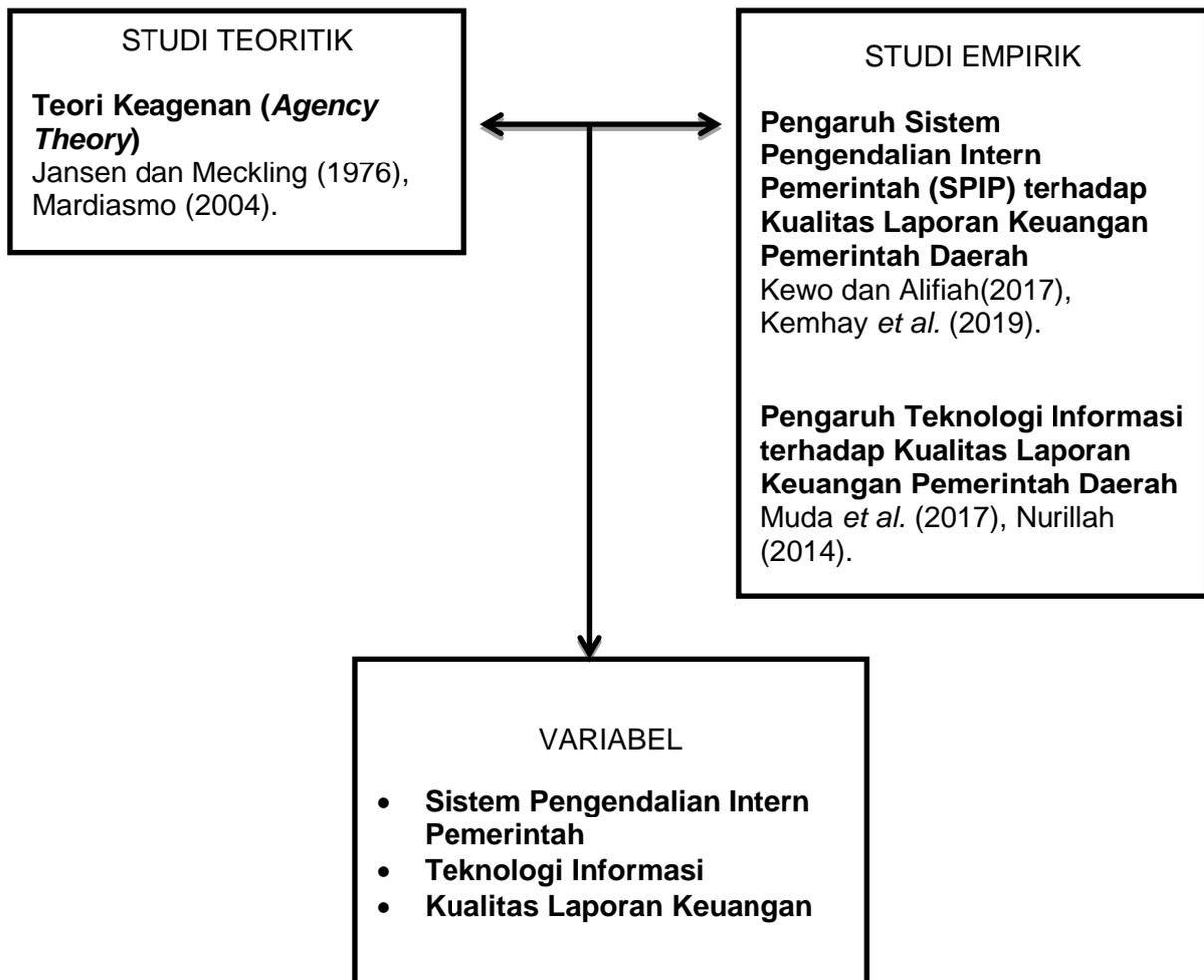
Kewo dan Alifiah(2017) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan kedua hipotesis yaitu *Internal Control Sistem* dan *Internal Audit* berpengaruh positif terhadap *Quality of Financial Statement* dengan koefisien determinasi 74,67%. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dan audit internal berdampak positif pada kualitas laporan keuangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan *pats analysis*.

Haliah (2012) meneliti tentang pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan moderasi teknologi informasi. Penelitian ini mengambil sampel pada peserta pendidikan profesi akuntan FEB Universitas Hasanuddin, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian intern secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan yang dimoderasi oleh variabel teknologi informasi. Hasil analisis data diketahui bahwa hipotesis null yang diajukan ditolak, koefisien interaksi antara teknologi informasi dan pengendalian intern menunjukkan nilai positif sebesar 0,243 dengan nilai t hitung sebesar 4,116 dan signifikan sebesar 0,0000 yang jauh lebih kecil dari 0,06.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kualitas laporan keuangan daerah yang baik memerlukan adanya pedoman dalam penyusunannya, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu sistem untuk menciptakan keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas tidak akan dapat dicapai tanpa adanya sistem pengendalian intern yang baik.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang menggambarkan variabel yang akan diuji. Kerangka pemikiran merupakan bagan komprehensif yang menunjukkan gambaran mengenai penyusunan skripsi berdasarkan studi teoritik dan studi empirik. Studi teoritik dilakukan dengan mempelajari teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam studi ini, yaitu Teori Keagenan (*Agency Theory*). Sedangkan, studi empirik dilakukan dengan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam studi ini. Berdasarkan studi teoritik dan studi empirik ditemukan variabel-variabel penelitian, sehingga menghasilkan sebuah hipotesis, yaitu pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern yang efektif mencakup tiga tujuan, diantaranya.

1. Keandalan laporan keuangan

Tujuan laporan keuangan intern adalah untuk memenuhi tanggungjawab manajemen dalam menyusun laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Manajemen bertanggungjawab untuk meyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan wajar sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Efektivitas dan Efisiensi operasi

Salah satu tujuan penting dalam sistem pengendalian intern pemerintah adalah akurasi informasi mengenai operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Peraturan yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan, peraturan yang terkait erat dengan akuntansi misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Menurut Budiawan *et al.* (2014) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Bogor. Penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dinilai dari efektivitas pengendalian internalnya saja, sehingga pemerintah harus mampu memenuhi aspek-aspek lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang dinilai berkualitas. Aspek-aspek tersebut diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini didukung oleh penelitian Maksum *et al.* (2017) bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan. Pengendalian intern di dalam pemerintah dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

“Pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan tidak berjalannya pengendalian intern, banyak terjadi penyimpangan dan kebocoran yang ditemukan di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik atau nilai informasi yaitu keterandalan”.

Kemhay *et al* (2019) dalam penelitiannya tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap laporan keuangan pemerintah daerah memberikan hasil yang positif dimana peranan dari sistem pengendalian internal terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah sangatlah tinggi yang terlihat dari penyajian laporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Afiah & Azwari (2015) tentang pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap keandalan laporan keuangan sebagai berikut.

“Implementation of the internal control sistem of government has positive and significant impact on the quality of financial reporting. Improving control of the internal control sistem of government become part of a very important role for the quality of financial reporting in local governance”.

Mulyadi (2019) membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pentingnya lingkungan pengendalian dalam proses pengembangan sistem dapat meningkatkan kualitas sistem dengan menyediakan penafsiran kebutuhan informasi dan pengetahuan tentang dinamika lingkungan pemakai secara akurat dan lengkap.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H1: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.2 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk

mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

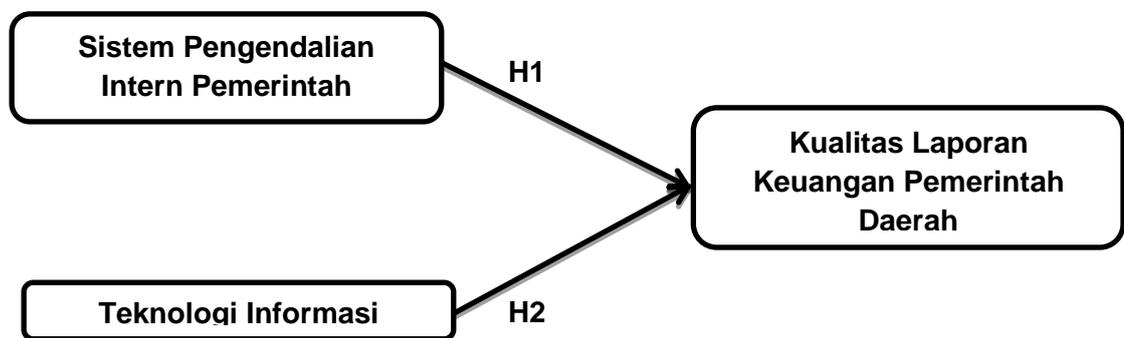
Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintah. Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada sektor publik sudah pernah dilakukan. Penelitian Sukarini *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki korelasi positif dan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hubungan antara penggunaan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan adalah semakin besar penggunaan teknologi informasi maka nilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik, dengan adanya penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yang tepat waktu dan akurat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam proses pengolahan data dalam penyajian laporan keuangan.

Uraian dan temuan mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketetapan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang akan terjadi dalam penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

H2: Penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan hipotesis di atas, maka kerangka konseptual pada penelitian ini digambarkan seperti gambar 2.4.



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual